

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Obat Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Katalog Obat Tahun 2018;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642);
4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor: FO.01.01/E.IV/1801/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Penyusunan Katalog Elektronik Obat Tahun 2018;
5. Surat Kementerian Kesehatan Nomor: FO.01.01/E.II.2/2211/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Kelompok Kerja Katalog Obat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari LKPP dan Kementerian Kesehatan RI yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Obat

1. Nama : Eko Rinaldo Octavianus
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Heldi Yudiyatna
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Lulu Haryani
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Muhamad Saifudin
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Muhammad Qadr Siddiq Zam
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Sigit Apriyanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

7. Nama : Bambang Saputra
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

8. Nama : Muchamad Abadi, S.Si, MPH, Apt
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota

9. Nama : Myta Suzana, S.Si, Apt
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota

10. Nama : Martin Sirait, S.Si, Apt
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota

11. Nama : Dewi Eka Safitri, S.Farm, Apt
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Obat

1. Nama : Afif Pramayuda
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

2. Nama : Hamam Anwaruddin Al Ghifari
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

3. Nama : Verani Restia Wijaya
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

4. Nama : Aldo Kautsar Rohim
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

5. Nama : Anggi Budi Pratiwi
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Obat memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Obat;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - i. Menjawab sanggahan;
 - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP; dan/atau
 - m. Mengenakan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Obat memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Obat selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Obat; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Obat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,



SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Kepala LKPP RI;
3. Sekretaris Utama LKPP RI;
4. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP RI;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI;
6. Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP RI; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.